

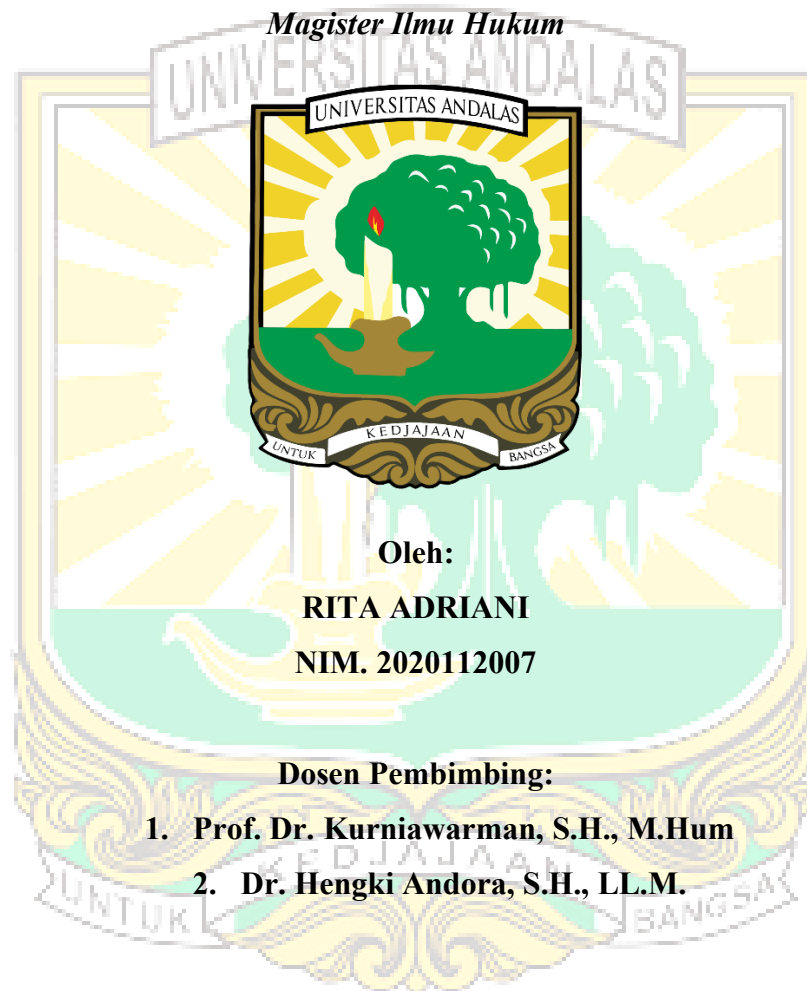
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP

PERATURAN NAGARI/DESA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum



Oleh:

RITA ADRIANI

NIM. 2020112007

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Kurniawarman, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M.**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERATURAN NAGARI/DESA

**(Rita Adriani, 202011207, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 143 halaman, Tahun 2023)**

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengawasan terhadap Peraturan Nagari/Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam kenyataannya peraturan nagari/desa tidak semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini menjawab tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa. Dalam tesis ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Bagaimana pengaturan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa? Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Nagari/Desa? Penelitian ini menggunakan gabungan penelitian hukum normatif dan empiris dengan sifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, pengaturan terkait Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peraturan nagari/desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2016 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pengaturan terkait evaluasi hanya diwajibkan terhadap rancangan peraturan nagari/desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi masyarakat desa, serta pemerintah nagari/desa menyampaikan peraturan nagari/desa setelah diundangkan. Kedua, Pengawasan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Peraturan Bupati dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada Kota Pariaman dilakukan baik pada DPMD dan Bagian Hukum Kota Pariaman khususnya terkait Peraturan Desa yang wajib evaluasi. Namun tidak semua Perna/Perdes dapat diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota karena pemerintah nagari memiliki kewenangan dalam pengundangan Perna/Perdes dalam Lembaran Desa/Nagari. Saran dalam penelitian ini adalah pertama, pengaturan pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap rancangan Peraturan Nagari/Desa hendaknya tidak hanya diatur untuk Perna/Perdes yang wajib evaluasi saja, namun perlu pengaturan pengawasan rancangan Perna selain wajib evaluasi agar wajib disampaikan juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum diundangkan dengan mekanisme evaluasi dan setelah diundangkan dengan mekanisme klarifikasi. Kedua, pengawasan terhadap peraturan nagari yang dilakukan satu pintu oleh DPMD memiliki kelemahan karena pada kenyataannya DPMD tidak memiliki keahlian di bagian peraturan perundang-undangan dan SDM sarjana hukum, sehingga perlu untuk mempertimbangkan kembali dengan memfungsikan secara maksimal Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam melakukan pembinaan, evaluasi dan klarifikasi Peraturan Nagari/Desa karena Bagian Hukum merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok terkait peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah nagari/desa memiliki kewenangan untuk mengundangan sendiri peraturan nagari/desa sehingga menyebabkan rancangan peraturan nagari/desa selain yang wajib evaluasi menjadi tidak terkontrol dan terawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu juga untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan nomor register kepada peraturan nagari/desa sebelum diundangkan, seperti halnya yang diatur pada rancangan peraturan daerah.

Kata kunci: Nagari, Desa, Peraturan Nagari/Desa, Pemerintah Daerah, Pengawasan.

DISTRICT OR CITY REGIONAL GOVERNMENT MONITORING TO NAGARI/VILLAGE REGULATIONS

(Rita Adriani, 2020112007, Law Faculty of Andalas University, 143 pages, year 2023)

ABSTRACT

Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Monitoring of Nagari/Village Regulations is carried out by the District/City Regional Government. However, in reality not all of the nagari/village regulations are in accordance with higher laws and regulations. This study answers how the implementation of monitoring by the District/City Regional Government on Nagari/Village Regulations. In this thesis, the focus of research is: How are the supervision arrangements of the Regency/City Regional Government regarding Nagari/Village Regulations? How is the implementation of the monitoring of the District/City Regional Government regarding Nagari/Village Regulations? This study uses a combination of normative and empirical legal research with a descriptive nature of analysis. Based on the results of the research: first, The regulations related to District/City Government Oversight of nagari/village regulations are regulated in Law No. 6 of 2016 concerning Villages, PP No. 43 of 2014 concerning Regulations for Implementing Law No. 6 of 2014 concerning Villages and Permendagri No. 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulation. Evaluation arrangements are mandatory for several draft nagari/village regulations only, and the nagari/village government submits the nagari/village regulations to the Regent/Mayor after promulgation. Second, Monitoring of the District Government, namely in Tanah Datar and Padang Pariaman Regencies, is carried out in one department namely Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) that based on the Regent's Regulation and carried out based on statutory regulations. Then in Pariaman City, it is carried out both at the DPMD and the Legal Department of Pariaman City Government, especially regarding Village Regulations that must be evaluated. However, not all Perna/Perdes can be monitoring by the District/City Regional Government because the nagari government has the authority to promulgate Perna/Perdes in the Village/Nagari Gazette. The suggestions in this study are first, District/City government monitoring arrangements for draft Nagari/Village regulations should not only be regulated for Perna/Perdes which are mandatory for evaluation, but also need to regulate monitoring of draft Perna/Perdes other than mandatory evaluation so that they must be submitted to the District/City Regional Government prior to promulgation with an evaluation mechanism and after promulgation with a clarification mechanism. Second, the monitoring of nagari regulations which is carried out by the DPMD has weaknesses because in reality the DPMD does not expertise in the field of legislation and it doesn't have human resources with a degree in law, so it is necessary to reconsider by optimally functioning the Legal Department of District Government in conducting, evaluation and clarification of Nagari/Village Regulations because the Legal Department is a regional apparatus that has main tasks related to laws and statutory regulations. Then, Nagari/village government has had the authority to promulgate the nagari/village regulations themselves, thus causing the draft of nagari regulations other than those that are required to be evaluated to become uncontrolled and monitored by the Regency/City Regional Government. Therefore, it is also necessary to give authority to the District/City Regional Government to be able to provide the register number to the nagari/village regulation before it is promulgated, as is the case as stipulated in the draft regional regulation.

Keywords: Nagari, Village, Nagari/Desa Regulations, Regional Government, Monitoring.